



Analisis Gender sebagai Jalan Keberhasilan Pengarustamaan Gender (PUG): Studi Kelurahan Manukan Kulon, Tandes, Kota Surabaya

Novita Maulida Ikmal^{1*}, Nur Holifah², Denny Iswanto³, Ika Septin⁴, Lusiani Elsa⁵

Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia

Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197, Indonesia

Article Info: Received: December 05, 2024; Revised: December 28, 2024; Accepted: December 31, 2024

Keywords

Gender;
PUG;
PPRG;
Equality;
GAP;
GBS;

Abstract

This research aims to analyze the government's role in implementing several policies to support Gender Mainstreaming (PUG) as an integral part of national development. This research method uses a descriptive qualitative approach. This research focuses on Gender Analysis as a Way of Success for Gender Mainstreaming (PUG), with the research location in Manukan Kulon Village, Surabaya, in 2024. Data collection using interviews. Data analysis using data reduction. The results showed that the success of PUG must be accompanied by gender analysis, gender needs analysis, determining gender-responsive planning and development, and making gender-responsive budgets with GAP and GBS in each institution. So, with disaggregated data through gender analysis, regional institutions can see the IPG in each region. The research concluded that in achieving the success of PUG, the community and institutions must understand the real construction of gender, gender differences, and gender needs inherent in women and men..

Kata Kunci

Gender;
PUG;
PPRG;
Kesetaraan;
GAP;
GBS

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendukung Pengarustamaan Gender (PUG) sebagai integral dari Pembangunan nasional. Metode penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah Analisis Gender sebagai Jalan Keberhasilan Gender Pengarustamaan Gender (PUG) dengan lokasi penelitian di Kelurahan Manukan Kulon, Surabaya tahun 2024. Pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis data menggunakan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan PUG harus diiringin dengan adanya analisis gender, analisis kebutuhan gender, menentukan perencanaan dan pembangunan yang responsif gender serta membuat anggaran yang responsif gender dengan GAP dan GBS di setiap lembaga. Sehingga dengan adanya data terpilah melalui analisis gender lembaga daerah dapat melihat IPG di setiap wilayah masing-masing. Kesimpulan penelitian diperoleh temuan bahwa dalam mencapai keberhasilan PUG diantaranya masyarakat dan Lembaga harus dapat memahami konstruksi gender yang sesungguhnya, serta perbedaan gender dan kebutuhan gender yang melekat pada perempuan dan laki-laki..

* **Corresponding author:** Novita Maulida Ikmal ✉ novitamaulidaikmal@uwp.ac.id
Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia

How to Cite (APA Style):

Ikmal, N. M., Holifah, N., Iswanto, D., Septin, I., & Elsa, L. (2024). Analisis Gender sebagai Jalan Keberhasilan Pengarustamaan Gender (PUG): Studi Kelurahan Manukan Kulon, Tandes, Kota Surabaya. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 6(2), 203-213. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v6i2.6806>



PENDAHULUAN

Strategi utama untuk mencapai Kesetaraan Gender (KG) yaitu dengan menerapkan Pengarus-tamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan, perumusan kebijakan dan penganggaran. PUG sebagai perspektif gender adalah proses untuk mengevaluasi implikasi perencanaan bagi laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya masalah legis-lasi, kebijakan atau program di daerah. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kesetaraan gender (Muhartono, 2020)

Hal ini bertujuan agar kepentingan laki-laki dan perempuan dapat tertampung, sehingga menciptakan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Dengan landasan hukum yang ada, kesetaraan dan keadilan gender (KKG) menjadi visi utama pemerintah yang ditindaklanjuti penyusunan rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan. Pengarus-tamaan Gender (PUG) pertama kali tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-tamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Fauziyah, 2020). Dewasa ini, Implementasi Pengarus-tamaan Gender (PUG) masih menjadi wacana pemerintah dalam pelaksanaannya.

Dalam menerapkan strategi Pengarus-tamaan Gender (PUG) dibutuhkan suatu alat (*tools*) yang menjadi dasar proses pelaksanaan baik dalam aspek kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu analisis gender menjadi acuan utama untuk menyusun kebijakan Pengarus-tamaan Gender (PUG) khususnya ditingkat pemerintah daerah dalam rangka mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Selain itu, analisis gender juga digunakan untuk memahami hubungan laki-laki dan perempuan, akses terhadap sumber daya, aktivitas dan keterbatasan perempuan dan laki-laki. Tantangan selanjutnya dalam kesetaraan gender adalah perkembangan isu-isu penelitian multidisiplin (Furyani et al., 2024). Pengembangan multidisiplin adalah sebuah kebutuhan mengingat PUG dan ARG sudah tampil dalam bentuk wacana dan kebijakan sehingga menjadi agenda dalam penerapannya.

Kebimbangan pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengarus-tamaan Gender (PUG) karena dianggap bahwa *Gender Mainstreaming* hanya memperjuangkan perempuan, sehingga strategi tersebut

menjadi lamban dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah umum yang masih ditemui di publik adalah 1) masih terdapatnya kesenjangan dalam pemerataan hasil pembangunan dalam berbagai bidang, baik perempuan maupun laki-laki; 2) Kesenjangan yang meliputi: akses, partisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan; dan 3) belum adanya program kesetaraan gender yang selama ini hanya meliputi sosialisasi/advokasi untuk perempuan, tidak membahas terkait laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan (Fithriyah, 2017).

Di Indonesia, sejarah pergerakan perempuan diawali dengan kegiatan kongres Perempuan Indonesia yang pertama (Insyarah & Yulifar, 2019). Hal ini menunjukkan sebuah pernyataan bahwa perempuan melakukan aktivitas yang setara dan mendukung kemerdekaan dan penghidupan di Indonesia. Marginalisasi Gerakan perempuan sebagai imbas G30S PKI. Masyarakat tidak melihat Gerwani sebagai aspirasi perempuan. Perempuan identic dengan organisasi ibu-ibu seperti PKK, Dharma Wanita dan sebagainya.

Pembedaan peran, fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan, serta peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma maupun struktur masyarakat Rahayu (2017). Konstruksi Gender pada masyarakat masih dipahami sebagai perbedaan jenis kelamin, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab bahkan terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di beberapa bagian masyarakat (Aziz & Iman, 2017). Berdasarkan ideologi gender yang dianut, masyarakat kemudian menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang bersifat operasional (Pramono et al, 2020).

Menurut Martiany (2011) indikator pencapaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia menggunakan kualitas gender didalamnya. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan besar dalam pencapaian keberhasilan Pengarus-tamaan Gender (PUG). Dimana seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki akses dan partisipasi yang sama dalam pembangunan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan Analisis Gender yaitu menggunakan Kerangka Kerja Mosser (Mosser's Framework). Menurut Mosser, Analisis Gender atau Diagnosis Gender berfokus mengidentifikasi implikasi khusus dan permasalahan spesifik dalam pembangunan (Valentina, 2019). Teori ini menjelaskan bahwa Analisis Gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan pembangunan (Gusti & Fitriani, 2021). Analisis gender dalam bentuk umum memaparkan sebuah metodologi untuk melihat apakah sebuah kebijakan memberikan perhatian terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Mulyadi, 2016)

Penelitian terdahulu (Martiany, 2011) tahun 2012 dengan judul artikel Implementasi Pengarus-tamaan Gender (PUG) sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). Hasil penelitian ditemukan bahwa Pengarus-tamaan Gender PUG belum dilaksanakan maksimal di kedua daerah tersebut. Martiany juga menuliskan bahwa Pengarus-tamaan Gender (PUG) merupakan strategi utama untuk dapat mencapai Kesetaraan Gender. Analisis Gender dianggap penting digunakan pada tahapan perencanaan pembangunan. Namun, di Provinsi Sumut, analisis gender belum dilaksanakan.

Hal ini yang juga merupakan salah satu hambatan yang cukup serius dalam implementasi Pengarus-tamaan Gender (PUG) di daerah, karena tahap perencanaan merupakan kunci utama untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Artikel yang serupa juga ditulis oleh Tigayanti, et al (2014) tahun 2014 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengarus-tamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme penyelenggaraan Pengarus-tamaan Gender (PUG) dari tingkat pusat sampai daerah menyebabkan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan khususnya di SMA 8 Malang tidak pernah maksimal, namun hanya sebatas pengetahuan dan kesadaran secara individu.

Penelitian Sri et al (2021) juga menjelaskan bahwa perlu beberapa aspek yang harus di analisis antara peran laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan kebijakan Pengarus-tamaan Gender (PUG). Hasil penelitian menjelaskan, bahwa Pengarus-tamaan Gender (PUG) belum diterapkan secara

maksimal di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurutnya Pengarus-tamaan Gender (PUG) merupakan satu dari sekian strategi pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Sebelum implementasi Pengarus-tamaan Gender (PUG) perlu diperhatikan terkait pengintegrasian permasalahan, aspirasi laki-laki dan perempuan, kebutuhan dan pengalaman laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan. dalam menepis isu terkait gender, bagi Indonesia perempuan Bersama laki-laki sudah terlibat di dalam peregerakan nasional. Dalam target MGDs pembangunan dunia tujuan utamanya adalah meletakkan perempuan sebagai isu sosial yang dikeluarkan oleh Bappenas dan PBB. Salah satu tujuannya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Wijayanto & Nurhajati, 2019).

Peran gender dalam lembaga menjadi penting ketika dimasukkan dalam penelitian. Tujuan penelitian gender adalah menempatkan gender, kebijakan atau kondisi yang ditampilkan berdasarkan data terpilah yang ditampilkan adalah gambaran netral gender (Syahriza, (2021). Tantangannya adalah kebijakan yang ditujukan secara langsung harus menjadi kebijakan yang spesifik gender dan bahkan yang di redistributive gender. Selain itu, diperlukan juga adanya kesadaran dan sensitivitas gender (*gender awareness dan gender sensitivity*) di tingkat kepemimpinan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak bias gender.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi kesetaraan dan keadilan gender di Kelurahan Manukan Kulon, khususnya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung implementasi Pengarus-tamaan Gender (PUG) di wilayah tersebut. Mengevaluasi sejauh mana program atau kebijakan PUG yang diterapkan di Kelurahan Manukan Kulon telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Maka kunci utama untuk jalan keberhasilan Pengarus-tamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan daerah adalah dengan memahami permasalahan gender melalui data terpilah gender yang kemudian perlu adanya

analisis gender untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diberikan terkait isu-isu gender.

METODE

Fokus penelitian ini adalah Analisis Gender sebagai Jalan Keberhasilan Gender Pengarustamaan Gender (PUG) dengan lokasi penelitian di Kelurahan Manukan Kulon, Surabaya tahun 2024. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara random sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Subjek penelitian ini telah ditentukan oleh peneliti, dengan mengedepankan faktor-faktor integritas dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Beberapa narasumber yang dipilih adalah actor di Kelurahan yakni Lurah, Bendahara, Sekretaris dan Tim Pokja Pengarustamaan Gender (PUG). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *depth interview* (wawancara mendalam) dan melalui teknik kuesioner tidak terstruktur. Dengan wawancara secara langsung, diharapkan peneliti mendapatkan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat.

Jenis data yang diperoleh oleh peneliti yang pertama adalah data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber (objek penelitian), observasi lapangan dan data tertulis yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan oleh pihak-pihak terkait. Data lainnya diperoleh melalui data-data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Serta data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang digunakan untuk mendukung data utama dalam penelitian. Data tambahan diperoleh antara lain dari buku, tesis, artikel, koran, media online dan lain sebagainya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada tahap awal dalam melakukan analisis data dengan cara pengumpulan data yaitu mengumpulkan segala informasi dan data-data di lapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data bersifat menampung semua informasi yang merupakan tahapan awal sebelum menyajikan data dan reduksi data.

Data yang sudah dipilah melalui reduksi data kemudian dianalisa menggunakan teori/kajian pustaka yang telah digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori analisis. Tahap terakhir proses analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasarkan pada data-data yang diperoleh yang telah melewati tahap reduksi data. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus hingga dapat dilakukan penarikan/verifikasi dari hasil wawancara tersebut. Analisis data bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian, kerangka analisis gender yang digunakan adalah kerangka yang dikembangkan oleh Caroline Mosser. Kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam proses perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu debat. Menurut Moser, Analisis Gender atau Diagnosis Gender berfokus mengidentifikasi implikasi khusus dan permasalahan spesifik dalam pembangunan. Teori ini menjelaskan bahwa Analisis Gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan pembangunan.

Adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebut sebagai perbedaan kodrati yang dikarenakan beberapa hal yakni tidak dapat berubah dari waktu ke waktu, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang jama, ciptaan Tuhan YME, dan berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja. Berikut perbedaan biologis perempuan dan laki-laki;

Tabel 1 Perbedaan Biologis Perempuan dan Laki-laki

Selain itu perbedaan biologis perempuan dan laki-laki melahirkan fungsi reproduksi biologis diantara keduanya yang bersifat kodrat, yaitu (1) Perempuan, menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; (2) Laki-laki : membuahi.

Tidak hanya perihal perbedaan biologi, dalam konstruksi sosial budaya, peran, fungsi, tanggungjawab, sikap dan perilaku perempuan ataupun laki-laki juga berbeda. Hal ini dikenal dengan istilah gender. Perbedaan ini dibentuk oleh proses pembiasaan

masyarakat yang secara terus menerus sehingga menciptakan marginalisasi pada salah satu peran. Salah satu contohnya adalah bahwa perempuan identik dengan cantik, lembut, memiliki karakter yang sopan. Sedangkan laki-laki identic dengan gagah dan pemberani.

Budaya seperti ini biasanya tumbuh dari proses sosialisasi melalui keluarga, negara, sekolah, tempat kerja, media massa dan interpretasi agama. Agama sesungguhnya menempatkan perempuan dan laki-laki sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan kewajiban dan hak-hak yang dimiliki. Namun, ada beberapa kelompok yang memiliki pemahaman agama yang keliru justru mencampurkan antara peran dogmatis dan peran dalam masyarakat sosial. Misalnya, dalam pemimpin sholat wajib laki-laki dengan menggunakan sistem khalifah, sehingga persepsi masyarakat bahwa perempuan tidak layak untuk jadi pemimpin dalam ruang publik. Sedangkan pemimpin masyarakat semestinya tidak di-

dasarkan atas khalifah namun berdasarkan kompetensi yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan.

Adanya perbedaan biologi dan hasil konstruksi sosial peran, fungsi, tanggungjawab, sikap dan perilaku antara laki-laki dan perempuan menimbulkan perbedaan kebutuhan diantara keduanya. Kebutuhan tersebut terbagi menjadi kebutuhan spesifik, kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan spesifik sesuai dengan jenis kelaminnya, kebutuhan praktis agar laki-laki dan perempuan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai peran gender yang melekat pada dirinya. Sedangkan kebutuhan strategis berawal dari posisi subordinat perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat sosial.

Berikut analisis gender dan analisis kebutuhan di Kelurahan Manukan Kulon berdasarkan Perencanaan dan Pembangunan Responsif Gender (PPRG):

Tabel 2. Analisis Gender

Analisis Gender Kelurahan Manukan Kulon		
Analisis Gender	Analisis Kebutuhan	PPRG
Perempuan secara biologis memiliki perbedaan yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Memproduksi sel telur • Menstruasi (jika tidak dibuahi) • Hamil (jika dibuahi) • Melahirkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembalut Perempuan • Air dalam jumlah memadai di kamar kecil • Kamar kecil yang terpisah dengan laki-laki • Tempat sampah tertutup • Informasi Pemeriksaan kehamilan dan papsmear untuk deteksi dini kanker leher Rahim di puskesmas • Ruang laktasi di kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pembalut di ruang kesehatan • Penyediaan sampah tertutup dan jaminan ketersediaan air bersih pada fasilitas kamar kecil • Penyediaan informasi terkait pemeriksaan papsmear dan deteksi dini kanker payudara di puskesmas atau rumah sakit • Penyediaan ruang laktasi
Laki-laki secara biologi, yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki penis • Memproduksi sperma 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan informasi pemeriksaan dini kanker prostat di puskesmas atau rumah sakit • Air dalam jumlah memadai di kamar kecil • Kamar kecil yang terpisah dengan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan informasi terkait pemeriksaan dini kanker prostat di puskesmas atau rumah sakit • Penyediaan sampah tertutup dan jaminan ketersediaan air bersih pada fasilitas kamar kecil • Khitan

Perencanaan dan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen awal dalam mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kebijakan pemerintah. Berdasarkan tabel diatas dengan studi kasus di Kelurahan Manukan Kulon, Tandes, Sby menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator kebutuhan gender yang didasarkan analisis gender. Kebutuhan gender tersebut kemudian dituangkan ke dalam pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masing-masing gender di intansi. Misalnya pemenuhan ruang laktasi, toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan ruang anak.

Selain itu dalam proses penganggaran kebijakan atau program yang responsif gender perlu diperhatikan terkait analisis anggaran. Anggaran responsif gender adalah penganggaran yang tidak terbatas pada uang, melainkan pada upaya menjamin kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan. Analisis anggaran yang responsif gender harus melihat kebutuhan gender yang ada di lapangan dalam hal ini Kelurahan Manukan Kulon. Berdasarkan data program dan kegiatan yang responsif gender, peneliti menganalisis program tersebut sesuai dengan kategori anggaran responsif gender sebagai berikut;

Tabel 3. Analisis Anggaran Responsif Gender Kelurahan Manukan Kulon

Analisis Anggaran Responsif Gender	
Anggaran Khusus Target Gender	
• Bantuan Modal untuk perempuan difabel	<input type="checkbox"/>
• Sosialisasi pencegahan perdagangan orang bagi warga miskin	<input checked="" type="checkbox"/>
• Pelatihan Kewirausahaan difabel	<input type="checkbox"/>
• Pemberian bantuan pada Masyarakat Miskin	<input checked="" type="checkbox"/>
• Sosialisasi kekerasan seksual, KRPPA dan RW Responsif Gender	<input checked="" type="checkbox"/>
• Kegiatan Pemberdayaan Perempuan RW dan Kelurahan	<input checked="" type="checkbox"/>
• Musrenbang dengan melibatkan organisasi perempuan	<input checked="" type="checkbox"/>
Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender	
• Bimtek implementasi regulasi tentang PPRG	<input checked="" type="checkbox"/>
• Pembentukan Tim Focal Point PUG	<input checked="" type="checkbox"/>

• Pelatihan PUG bagi Pokja PUG	<input checked="" type="checkbox"/>
• Penyusunan data pilah gender bidang kesehatan, Pendidikan dan pendapatan Anggaran Kesetaraan Gender	<input checked="" type="checkbox"/>
• Program bantuan Pendidikan bagi siswa siswi dari RT miskin	<input checked="" type="checkbox"/>
• Kegiatan forum anak kelurahan	<input checked="" type="checkbox"/>
• Kegiatan pelatihan bagi UMKM perempuan	<input checked="" type="checkbox"/>

Berdasarkan analisis anggaran gender diatas maka dapat dilanjutkan dengan menggunakan alat analisis gender yang disebut dengan Gender Analysis Pathway (GAP). Adanya data terpilah gender di instansi kelurahan dapat memudahkan dalam pelaksanaan penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) di tingkat daerah. Hal tersebut juga merupakan salah satu prasyarat dari tujuh prasyarat implementasi Pengarustamaan Gender (PUG). Tentunya dalam penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) perlu diperhatikan sumber daya manusia yang memahami terpakai proses analisis. Selanjutnya perlu adanya dukungan dokumen akuntabilitas spesifik yang menginformasikan bahwa suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada.

Dokumen akuntabilitas tersebut disebut dengan Gender Budget Statement (GBS). Melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dapat mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam isu-isu global yang berkaitan dengan gender. Pada umumnya, Teknik penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama penyusunan perencanaan yang responsif gender Gender Analysis Pathway (GAP) dan tahap kedua penyusunan anggaran yang responsif gender melalui Gender Budget Statement (GBS) serta Term of Reference (TOR) dalam setiap kegiatan atau program, dalam hal ini Kelurahan Manukan Kulon.

Kerangka kerja Gender Analysis Pathway (GAP) terdiri dari dua komponen utama yaitu tahap analisis yang terdiri kegiatan yang akan dianalisis (identifikasi, tujuan), data pembuka wawasan (kuantitatif, kualitatif), isu gender (isu gender dalam perencanaan, internal dan eksternal lembaga). Tahap Integrasi Gender terdiri dari merumuskan kembali tujuan kegiatan, menyusun ren-

cana aksi yang repsonsif gender, menetapkan base-line dan menetapkan indikator gender. Berikut tabel Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender

Budget Statement (GBS) Pemberdayaan dan Pembangunan Kelurahan Manukan Kulon, Surabaya:

Tabel 4 Gap GBS TOR Pemberdayaan

Gender Analysis Pathway (Gap) Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Akan Dianalisis	DATA PEMBUKA WAWASAN	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
<p>Program: Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon</p> <p>Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Manukan Kulon</p> <p>Subkegiatan: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p> <p>Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Mencukupi kebutuhan Masyarakat terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan serta meningkatkan kualitas kelurahan</p> <p>Sasaran Subkegiatan: Masyarakat di Kelurahan Manukan Kulon</p>	<p>∑ Penduduk Kelurahan Manukan : L: 19.208 orang P: 19.929 orang</p> <p>∑ RT tahun 2024: L : 113 orang P : 11 orang</p> <p>∑ RW tahun 2024 : L : 13 orang P : 2 orang</p> <p>Salah satu sub kegiatan di Kelurahan Manukan Kulon isinya berupa upaya pemberdayaan sarana dan prasarana umum</p>	<p>Akses: Masih adanya perbedaan akses antara golongan perempuan dan laki-laki terhadap akses pengusulan untuk pemberdayaan dan pemenuhan sarana prasarana</p> <p>Partisipasi: Masyarakat dan penyedia /pokmas</p> <p>Kontrol: Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan bergantung pada ketersediaan anggaran kelurahan</p> <p>Manfaat: Dengan adanya pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang ada di wilayah Kelurahan Manukan Kulon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya SDM untuk pemberdayaan sarana dan prasarana • Belum optimalnya proses pemberdayaan dan pemenuhan sarana prasarana 	Masih adanya pola pikir masyarakat bahwa perempuan tidak perlu berperan aktif dalam organisasi dan lebih baik di rumah saja sebagai ibu rumah tangga	Menukupi kebutuhan masyarakat terhadap sarana prasarana yang dibutuhkan serta meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan lingkungan di Kelurahan Manukan Kulon yang lebih responsive gender dengan memperhatikan berbagai kelompok	Saat pelaksanaan rapat musyawarah kelurahan, pihak pegawai kelurahan akan lebih aktif lagi mengundang perwakilan perempuan misal para KSH, PKK, Karang Taruna dsb	∑ Penduduk Kelurahan Manukan : L: 19.208 orang P: 19.929 orang	Output : terpenuhinya pemberdayaan sarana dan prasarana Outcome : Nilai layanan kepuasan Masyarakat di kelurahan Manukan Kulon 100%

Tabel 5 GAP GBS TOR Pembangunan

Gender Analysis Pathway (Gap) Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan & Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender

<p>Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN MANUKAN KULON</p> <p>Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Manukan Kulon</p> <p>Sub kegiatan: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tujuan Kegiatan</p> <p>Subkegiatan: Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun</p> <p>Sasaran Subkegiatan : Sarana prasarana berupa saluran pembuangan air kotor dari rumah tangga ke saluran sekunder)</p>	<p>Pembangunan Sarana Prasarana berupa Saluran Pembuangan Air Kotor dilaksanakan karena kondisi di Kelurahan Manukan Kulon kurang layak dan kurang lancar (tidak sesuai standar).</p> <p>Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kelurahan Manukan Kulon, diperlukan optimalisasi saluran pembuangan air kotor</p> <p>Jumlah RT tahun 2024: L : 111 orang P : 13 orang</p> <p>Jumlah RW tahun 2024 : L : 13 orang P : 2 orang</p> <p>Permasalahan terkait saluran pembuangan air kotor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan 2. Adanya sedimen yang menghambat aliran 3. Belum adanya jadwal rutin terkait pembersihan saluran 4. Kesadaran Warga masih kurang untuk membersihkan saluran / got di depan rumah <p>Fasilitas pelayanan publik yang ada di Kelurahan Manukan Kulon:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasar • Puskesmas • SD • Tempat Ibadah • SPBU Pertamina 	<p>Akses: Warga memiliki akses pembuangan air kotor ke saluran sekunder</p> <p>Partisipasi: Setiap warga memiliki saluran pembuangan air kotor</p> <p>Kontrol: Warga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur saluran sekunder</p> <p>Manfaat: Apabila saluran air berfungsi optimal, maka dapat mencegah banjir dan penyakit</p> <p>Akses: Tidak ada kesenjangan akses antara laki laki dan perempuan dalam sub kegiatan ini</p> <p>Partisipasi: Lebih banyak partisipasi laki laki dalam sub kegiatan ini dibanding perempuan</p> <p>Kontrol: Pejabat pengambil keputusan dalam subkeg ini lebih banyak laki laki</p> <p>Manfaat: Manfaat dari sub kegiatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat baik laki laki dan perempuan</p>	<p>Belum adanya jadwal rutin untuk membersihkan saluran pembuangan air.</p> <p>Monitoring saluran air belum optimal. Sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK), terdapat kekurangan SDM.</p>	<p>Adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan</p> <p>Warga kurang memiliki kesadaran terhadap kesehatan sanitasi</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun berupa Optimalisasi Saluran Pembuangan Air Kotor</p>	<p>Sosialisasi terkait Permasalahan Saluran Pembuangan Air Kotor kepada warga</p> <p>Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Kotor</p> <p>Pembangunan Saluran Pembuangan Air Kotor</p>	<p>Pada tahun 2023, sosialisasi dilaksanakan 6 bulan sekali</p> <p>Pada tahun 2023, pemeliharaan dilaksanakan 4 kali sesuai laporan warga</p> <p>Pada tahun 2022, Pembangunan dilaksanakan pada saluran air kotor yang belum sesuai standar</p> <p>Estimasi Jumlah Penduduk Kelurahan tahun 2024 L: 19.208 orang P: 19.929 orang</p>	<p>Output Aktivitas Sosialisasi dilaksanakan 3 bulan sekali</p> <p>Terlaksananya pemeliharaan sesuai kondisi saluran yang rusak</p> <p>Terlaksananya pembangunan saluran pembuangan air kotor baru</p> <p>Output Terbangunnya saluran U dicit</p> <p>Outcome Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai PPRG</p>
---	---	---	---	--	--	--	--	--

Pembahasan

Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai integral dari Pembangunan nasional. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mewujudkan adanya kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan dan memastikan semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara setara dalam proses. Pembangunan nasional. Kebijakan utama pe-

merintah terhadap PUG yakni Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Instruksi ini mengarahkan semua kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pada dasarnya implementasi PUG membutuhkan strategi yang komprehensif agar dapat

mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kelurahan. Dalam di Kelurahan Manukan Kulon Tersedia kelompok kerja (POKJA) PUG yang disebut dengan Tim Focal Point PUG. Kelompok kerja ini dibentuk untuk dapat mendukung pelaksanaan strategi Pengarustamaan Gender (PUG) di tingkat daerah atau nasional. Tim ini bertugas melakukan berbagai kegiatan gender diantaranya adalah; 1) mempromosikan pengarustamaan gender pada unit kerja; 2) Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dengan menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), Term of Reference (TOR); 3) Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarustamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja; 4) Menyusun data gender dan anak pada unit kerja; 5) Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan 6) Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan.

Daerah di tingkat Kabupaten/Kota saat ini telah komitmen untuk menjadikan PUG sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Komitmen ini ditunjukkan dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang rama terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Hal ini merupakan bagian dari pengakuan bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai kegiatan publik. Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk dapat memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa (Indriyany et al., 2021).

Analisis gender dengan dibuktikan data terpilah gender merupakan sebuah komitmen besar instansi atau lembaga dalam mengimplementasikan pengarustamaan gender sesuai dengan arahan peraturan Walikota Surabaya Nomo 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender. Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pember-

dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam pencapaian keberhasilan PUG perlu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG). Perencanaan yang responsif gender sendiri yakni merupakan perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Tentunya sebelum melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kelurahan Manukan Kulon diwajibkan untuk menggunakan analisis gender dalam menyusun kebijakan strategis dan kebijakan opsional.

Selain itu perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) juga dilakukan sebagai instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, control dan manfaat antara Perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan Pembangunan, hal ini bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan (Ulfa et al., 2022). Hal yang utama dalam melakukan analisis gender yakni menyiapkan data terpilah gender yang diperlukan untuk memisahkan kategori gender. Hal ini menjadi penting untuk melakukan analisis gender karena dapat mengidentifikasi dan melakukan pengukuran perbedaan pengalaman, akses, dan control antara kelompok gender dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi utama data terpilah dalam analisis gender yakni dapat mengidentifikasi adanya ketimpangan atau mendeteksi ketidaksetaraan dalam akses terhadap pekerjaan, merumuskan kebijakan yang lebih adil sesuai dengan kebutuhan kelompok gender yang berbeda, mengevaluasi dampak program terhadap berbagai kelompok gender, memberikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung advokasi kesetaraan gender dan memastikan bahwa penyelenggara program atau pembuat kebijakan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan semua kelompok.

Analisis gender memiliki tujuan untuk memahami dan mengevaluasi perbedaan peran, kebutuhan, peluang dan tantangan antara laki-laki dan Perempuan (Nurchahaya & Akbarizan, 2023). Analisis gender ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan gender yang ada di Kelurahan Manukan Kulon. Pembangunan yang berkelanjutan

memberikan manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Hal ini dilihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada setiap daerah. Perencanaan responsif gender diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang memenuhi standar kesetaraan gender, dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga kategori anggaran responsif gender (ARG), yakni:

- 1) Anggaran khusus target gender (anggaran untuk pemenuhan kebutuhan spesifik menurut jenis kelamin);
- 2) Alokasi anggaran diperuntukkan untuk kebutuhan dasar laki-laki dan perempuan tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Penerima manfaat merupakan masyarakat yang termarginalkan atau kelompok rentan seperti orang miskin, difabel, korban kekerasan berbasis gender, korban pelecehan seksual atau korban TPPO.
- 3) Anggaran pelembagaan kesetaraan gender (anggaran untuk affirmative action); Berfungsi meningkatkan IPG serta memperkuat kunci prasyarat PUG. Penerima manfaat yaitu perempuan pejabat, aparat pemerintah, organisasi non pemerintah, ataupun ormas.
- 4) Anggaran kesetaraan gender (pengeluaran secara umum). Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mengatasi masalah kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, misalnya pembangunan dibidang Pendidikan.

Pembangunan yang berkelanjutan memberikan manfaat yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Hal ini terlihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada setiap daerah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang mempertimbangkan dimensi kesetaraan gender. Komponen utama Indeks Pembangunan Gender (IPG) yakni menghitung tiga dimensi utama pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender berdasarkan kesehatan, pendidikan dan penghasilan. Indeks Pembangunan Gender di Kelurahan Ma-

nukan Kulon baik, hal tersebut dibuktikan dengan nilai IPG 0,97%. Interpretasi data menunjukkan semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. adanya namun jika dilihat pada capaian variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih terdapat sedikit kesenjangan gender, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sedangkan pada pendapatan, perempuan lebih tertinggal daripada laki-laki. Sementara untuk angka melek huruf (AMH) memiliki jumlah yang sama.

KESIMPULAN

Dalam pencapaian keberhasilan PUG perlu adanya komitmen dari masyarakat dan Lembaga atau instansi daerah. Mengingat pentingnya peran mereka dalam berhasilnya kesetaraan gender. Saat ini isu wacana terkait gender masih menjadi trend topic di public. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam mencapai keberhasilan PUG diantaranya masyarakat dan Lembaga harus dapat memahami konstruksi gender yang sesungguhnya, serta perbedaan gender dan kebutuhan gender yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Dengan memahami perbedaan tersebut Lembaga khususnya dalam penelitian ini adalah Kelurahan Manukan Kulon membentuk Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli anak dengan beberapa program kegiatan yang responsive gender. Hal ini merupakan upaya pencapaian PUG ke dalam kesetaraan gender. Salah satu tujuan dari dibentuknya Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak adalah memberdayakan dan mengembangkan masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan pengarahan sebagai bentuk responsive gender. Data terpilah dalam analisis gender menjadi pendukung utama dalam keberhasilan PUG. Keberhasilan pencapaian PUG selanjutnya adalah dengan menentukan Perencanaan dan Pembangunan responsive gender, anggaran responsive gender dan membuat GAP/GBS pembangunan dan pemberdayaan.

REFERENSI

- Aziz, A., & Iman, N. (2017). Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia). *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1), 27-37.

- <https://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>
Fauziyah, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 1-18.
- <https://doi.org/10.61492/jpmmocci.v2i1.88>
Fithriyah, F. (2017). Indonesia's experience: Implementing gender responsive planning and budgeting. *Indonesian Journal of Development Planning*, 1(1), 59-75.
<http://dx.doi.org/10.36574/jpp.v1i1.9>
- Furyani, S., Suhaimi, A., & Jazuli, M. M. (2024). Paradigma Mubadalah sebagai Solusi Relasi Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 210-223.
<https://doi.org/10.32332/w4qcp096>
- Gusti, M., & Fitriani, E. (2021). Partisipasi Perempuan dalam Pengembangan Wisata "Desa Terindah" Nagari Pariangan. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 3(1), 1-13.
<https://doi.org/10.24036/csjar.v3i1.85>
- Indriyany, I. A., Hikmawan, M. D., & Utami, W. K. (2021). Gender dan pendidikan tinggi: Studi tentang urgensi kampus berperspektif gender. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55-72.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9376>
- Insyarah, R. L., & Yulifar, L. (2019). Peranan raden ajeng sutartinah dalam memperjuangkan hak pendidikan untuk perempuan melalui organisasi wanita tamansiswa tahun 1922-1971. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(2), 171-186.
<https://doi.org/10.17509/factum.v8i2.22148>
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121-136.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i2.437>
- Mehra, R., & Gupta, G. R. (2006). Gender mainstreaming: Making it happen. *International Center for Research on Women (ICRW)*.
- Moser, C. O. (2014). *Gender planning and development: Revisiting, deconstructing and reflecting*. England: Development Planning Unit, The Bartlett, University College London.
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, 13(2), 117-134.
<https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175>
- Mulyadi, U. (2016). Representasi perempuan dalam film cinta suci zahrana. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(2), 150-158.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/makna/article/view/2789/2050>
- Nurchahaya, N., & Akbarizan, A. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108-116.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397647>
- Pramono, W., Jendrius, J., & Putri, Z. E. (2020). Pola Relasi Gender dan Ketangguhan Masyarakat Suatu Kajian Gender dalam UMKM di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 6(2), 106-121.
<https://doi.org/10.25077/jsa.6.2.106-121.2020>
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 93-108.
<https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1524>
- Sri, G. P. S. A. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 11-11.
<https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.342>
- Syahriza, R. (2021). Sistem Data Terintegrasi Terinterkoneksi Untuk Data Pilah Gender Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(2), 86-118.
<http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8721>
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus

SMA 8 Malang). *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(3), 201-208.
<https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11293>

Ulfa, W., Zainuddin, M., Khalil, Z. F., Muazzinah, M., & Nashriyah, N. (2022). The City of Banda Aceh's planning and budgeting in regional work units: Are they gender responsive?. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(1), 63-73.
<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.12212>

Valentina, A. (2019). Analisis Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Lampung Tengah. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 17(2), 195-214.
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4887>

Wijayanto, X. A., & Nurhajati, L. (2019). Framing Media Online atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 3(1), 14-23.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/lugas/article/view/409/0>